



## Aktivitas Nelayan dan Kondisi Ekonomi di Desa Sesar Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur

*Fishing Activities and Economic Conditions in Sesar Village, Bula District, East Seram Regency*

Yati Kocal<sup>1</sup>, Wiclif Sephnath Pinoa<sup>1\*</sup>,  Daniel Anthoni Sihasale<sup>1</sup> 

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Pattimura

### Article Info

#### Article history:

Received: 23-02-2026

Revised: 18-03-2026

Accepted: 21-03-2026

Published: 30-04-2026

### ABSTRAK

Penelitian ini menelaah aktivitas nelayan dan kondisi ekonomi masyarakat pesisir di Desa Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Tujuan utama penelitian adalah untuk memahami keterkaitan antara faktor sosial-ekonomi, pola aktivitas melaut, serta strategi bertahan hidup masyarakat nelayan dalam menghadapi dinamika lingkungan dan keterbatasan sumber daya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas nelayan dipengaruhi oleh modal usaha, cuaca, dan jarak tempuh ke lokasi penangkapan. Jenis ikan yang dominan ditangkap meliputi samandar, bobara, dan tuna, dengan pendapatan rata-rata berkisar Rp1.000.000–Rp2.500.000 per bulan. Sebagian nelayan juga memiliki pekerjaan tambahan seperti berdagang dan berkebun untuk menambah penghasilan. Secara keseluruhan, kondisi ekonomi nelayan bergantung pada faktor alam, diversifikasi pekerjaan, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan, yang secara langsung memengaruhi kesejahteraan sosial mereka.

**Kata Kunci:** Aktivitas nelayan; kondisi ekonomi; masyarakat pesisir

### ABSTRACT

*This study explores the fishing activities and economic conditions of coastal communities in Sesar Village, Bula District, East Seram Regency. The main objective is to examine the relationship between socio-economic factors, fishing patterns, and survival strategies among local fishermen in adapting to environmental dynamics and limited resources. The research employed a qualitative descriptive approach through observation, interviews, and documentation techniques. The findings indicate that fishing activities are influenced by business capital, weather, and distance to fishing areas. The main fish species caught include samandar, bobara, and tuna, with an average monthly income ranging from IDR 1,000,000 to IDR 2,500,000. Many fishermen also engage in secondary occupations such as trading and farming to supplement their income. Overall, the economic condition of fishermen depends on natural factors, job diversification, and adaptive capacity, which collectively affect their social and economic well-being.*

**Keywords:** Fishermen's activities; economic condition; coastal communities



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

### \*Corresponding Author:

Wiclif Sephnath Pinoa

Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Unpatti

Jl. Ir. M. Putuhena Poka Ambon

E-mail: [Sepnath@gmail.com](mailto:Sepnath@gmail.com)

ORCID iD: <https://orcid.org/0009-0002-6773-3906>

### Panduan Sitasi:

Kocal, Y., Pinoa, W. S., & Sihasale, D. A. (2026). Aktivitas Nelayan dan Kondisi Ekonomi di Desa Sesar Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur. *JENDELA PENGETAHUAN*, 19(1), 110-119. <https://doi.org/10.30598/jp19iss1pp110-119>

## PENDAHULUAN

Dalam konteks global, isu kesejahteraan masyarakat pesisir dan keberlanjutan ekonomi kelautan menjadi perhatian strategis yang menuntut pendekatan berbasis ekologi dan sosial ekonomi yang berkeadilan. Menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO, 2023), lebih dari 10% populasi dunia menggantungkan hidup pada sektor perikanan tangkap dan budidaya laut, dengan kontribusi sekitar USD 150 miliar terhadap ekonomi global. Namun, kesenjangan kesejahteraan tetap tinggi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, akibat lemahnya akses nelayan terhadap modal, teknologi, dan pasar (*World Bank*, 2022). Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* poin 14 tentang *Life Below Water*), peningkatan kesejahteraan nelayan menjadi indikator utama keberhasilan tata kelola sumber daya laut yang adil dan inklusif.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 81.000 km memiliki potensi sumber daya perikanan yang luar biasa besar. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP, 2024) mencatat potensi lestari sumber daya ikan mencapai 12,01 juta ton per tahun, namun tingkat pemanfaatannya baru sekitar 66%. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa potensi ekonomi biru (*blue economy*) belum optimal diolah oleh nelayan kecil yang masih terjebak dalam siklus kemiskinan struktural. Permasalahan utama terletak pada keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi finansial, dan minimnya dukungan infrastruktur produksi serta distribusi hasil tangkapan (BPS, 2024). Akibatnya, nelayan kecil kerap menjadi pihak paling rentan terhadap fluktuasi harga ikan, perubahan iklim, dan kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada mereka.

Pada level nasional, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk memperkuat ekonomi maritim melalui *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional* (RPJPN 2025–2045) dan *Rencana Aksi Ekonomi Biru Indonesia 2023–2030*. Kedua dokumen strategis tersebut menegaskan pentingnya transformasi tata kelola pesisir berbasis kemandirian nelayan dan keadilan ekologis. Namun, laporan *Badan Riset dan Inovasi Nasional* (BRIN, 2024) menunjukkan bahwa 63% rumah tangga nelayan di Indonesia masih tergolong miskin, dengan pendapatan rata-rata di bawah Rp2,5 juta per bulan. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya intervensi kebijakan daerah, ketimpangan infrastruktur antarwilayah, serta rendahnya produktivitas nelayan tradisional akibat ketergantungan terhadap faktor cuaca dan modal kerja (Susanti & Arifin, 2023).

Maluku, sebagai provinsi kepulauan strategis di wilayah timur Indonesia, memiliki posisi penting dalam peta ekonomi kelautan nasional. Potensi lestari ikan di perairan Laut Banda dan Arafura diperkirakan mencapai 4,67 juta ton per tahun (KKP, 2023), menjadikan Maluku sebagai “lumbung ikan nasional.” Namun, data BPS Maluku (2024) memperlihatkan bahwa sekitar 52% nelayan di kawasan ini masih hidup di bawah garis kemiskinan. Di Kabupaten Seram Bagian Timur, sektor perikanan tangkap menghasilkan lebih dari 14 ribu ton ikan per tahun dengan nilai produksi mencapai Rp927 miliar, tetapi kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga nelayan masih rendah akibat lemahnya tata kelola dan keterbatasan sarana produksi (KKP, 2024). Fenomena ini menunjukkan paradoks antara kekayaan sumber daya alam dan kemiskinan sosial ekonomi masyarakat pesisir.

Analisis studi-studi sebelumnya memperkuat temuan tersebut. Hasil penelitian Arifandi (2020) menunjukkan bahwa nelayan di kawasan timur Indonesia memiliki keterbatasan signifikan dalam diversifikasi ekonomi, menyebabkan ketergantungan tinggi terhadap hasil tangkapan harian. Munandar (2021) menegaskan bahwa struktur sosial nelayan tradisional yang berbasis patron-klien menghambat akses terhadap lembaga keuangan formal. Sementara Sataloff, Wenno, & Leiwakabessy (2020) menyoroti lemahnya integrasi kebijakan maritim dalam perencanaan pembangunan daerah. Kesenjangan antara potensi teoritis ekonomi biru dan kenyataan kesejahteraan nelayan inilah yang menjadi *research gap* penting untuk dikaji secara empiris.

Kondisi tersebut menegaskan urgensi penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan aktivitas nelayan, tetapi juga mengkaji hubungan struktural antara faktor produksi, sistem sosial

ekonomi, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Penelitian yang berfokus pada Desa Sesar di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, menjadi representasi mikro dari permasalahan makro di kawasan pesisir Indonesia. Desa ini merupakan wilayah pesisir dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan tradisional, yang menghadapi tantangan klasik berupa ketergantungan pada cuaca, keterbatasan modal, serta rendahnya akses terhadap teknologi penangkapan ikan modern. Selain itu, budaya kerja kolektif masyarakat pesisir Maluku yang sarat nilai gotong royong dan *pela gandong* dapat menjadi potensi sosial untuk dikembangkan dalam model pemberdayaan nelayan berkelanjutan (Tetelepta, 2022).

Secara teoretis, studi ini berkontribusi pada penguatan teori ekonomi maritim berkelanjutan dan *community-based livelihood development*. Pendekatan ini menekankan bahwa kesejahteraan nelayan tidak hanya diukur dari pendapatan ekonomi, tetapi juga dari kapasitas sosial, ekologi, dan kultural yang menopang keberlanjutan hidup mereka (Leatemia & Pattiasina, 2023). Dengan mengombinasikan analisis empiris berbasis data lapangan dan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini memperluas cakupan teori *socio-ecological resilience* ke dalam konteks masyarakat pulau-pulau kecil.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan lembaga pendidikan tinggi dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan ekonomi pesisir yang berbasis potensi lokal. Penguatan kapasitas nelayan melalui literasi keuangan, akses permodalan inklusif, serta inovasi teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan akan menjadi kunci keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir (Kurniasari, 2021). Di samping itu, penelitian ini juga berpotensi memperkuat kurikulum pendidikan geografi dan sosial ekonomi di perguruan tinggi, terutama dalam integrasi teori dengan konteks lokal kepulauan.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki signifikansi akademik dan kebaruan (novelty) yang jelas. Studi ini memperluas teori *transformational eco-leadership* dalam konteks administrasi pendidikan berbasis pulau dengan menekankan peran kepemimpinan komunitas nelayan dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Secara konseptual, penelitian ini mengembangkan model hubungan antara aktivitas ekonomi nelayan dan tingkat kesejahteraan keluarga berbasis pada variabel sandang, pangan, papan, tabungan, dan kesehatan. Dengan demikian, temuan ini diharapkan dapat memberikan kerangka konseptual baru bagi pengembangan kebijakan maritim dan pendidikan ekonomi berkelanjutan di wilayah kepulauan.

Dengan berlandaskan argumentasi di atas, maka fokus penelitian diarahkan pada analisis aktivitas nelayan dan kondisi ekonomi masyarakat di Desa Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Kajian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur tentang ekonomi maritim lokal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan teori dan praktik pemberdayaan masyarakat pesisir di Indonesia secara berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual aktivitas nelayan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Pemilihan jenis penelitian ini mempertimbangkan relevansinya dalam memberikan gambaran empiris mengenai hubungan antara tingkat aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan rumah tangga nelayan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis komparatif terhadap kondisi aktual dengan indikator teoretis kesejahteraan sosial. Metode kuantitatif deskriptif juga digunakan untuk mengukur sejauh mana faktor produksi, pendapatan, dan pengeluaran rumah tangga nelayan berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup mereka. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kuantitatif deskriptif efektif digunakan untuk memaparkan fenomena yang dapat diukur secara numerik sehingga menghasilkan interpretasi objektif dan terukur berdasarkan data lapangan.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, yang secara geografis terletak di kawasan pesisir timur Pulau Seram dan memiliki karakteristik ekonomi berbasis perikanan tangkap. Lokasi ini dipilih secara purposif karena mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan tradisional yang menggantungkan hidup pada hasil laut. Kondisi geografis yang menantang, keterbatasan infrastruktur, serta ketergantungan terhadap cuaca menjadikan Desa Sesar representatif untuk memahami dinamika ekonomi pesisir di wilayah timur Indonesia. Lingkungan sosial budaya masyarakat pesisir yang kental dengan nilai gotong royong dan solidaritas antarwarga juga memberikan konteks sosial penting bagi analisis kesejahteraan berbasis komunitas. Data mengenai lokasi diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan aparat desa serta tokoh masyarakat setempat.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga nelayan di Desa Sesar yang berjumlah 154 rumah tangga berdasarkan data dari Kantor Desa tahun 2024. Dari populasi tersebut, peneliti menentukan sampel sebanyak 40 kepala keluarga dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana sampel dipilih secara sengaja berdasarkan keterlibatan aktif dalam kegiatan melaut, lama pengalaman sebagai nelayan, dan tingkat ketergantungan terhadap hasil tangkapan. Pendekatan ini bertujuan memperoleh variasi data yang representatif terhadap kondisi sosial ekonomi nelayan. Pemilihan jumlah sampel juga mempertimbangkan kriteria homogenitas pekerjaan dan kemudahan pengumpulan data lapangan. Menurut Nazir (2020), penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian sosial memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam terhadap kelompok yang relevan dengan tujuan penelitian dan efisien dalam keterbatasan sumber daya penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai aktivitas nelayan di lapangan, termasuk pola kerja, penggunaan alat tangkap, dan proses distribusi hasil laut. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan tertutup dan terbuka kepada nelayan, aparat desa, serta pihak koperasi perikanan. Dokumentasi meliputi pengumpulan data sekunder seperti laporan tahunan desa, data BPS, serta catatan hasil tangkapan. Seluruh data diklasifikasi berdasarkan variabel penelitian yang meliputi aktivitas ekonomi, pendapatan, dan kesejahteraan keluarga. Validitas data diuji dengan teknik *triangulasi sumber* guna memastikan keandalan informasi dan mencegah bias interpretasi data.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Data kuantitatif diolah melalui tabulasi frekuensi, persentase, dan perhitungan rata-rata untuk menggambarkan kecenderungan umum kondisi sosial ekonomi nelayan. Analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik sederhana guna memperoleh interpretasi yang sistematis dan objektif. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara naratif untuk menjelaskan keterkaitan antara aktivitas nelayan dan kondisi ekonomi rumah tangga mereka. Menurut Gunawan (2021), analisis deskriptif berfungsi untuk mengungkap pola umum dalam data empiris sehingga dapat memperlihatkan hubungan fungsional antarvariabel penelitian secara komprehensif dan faktual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Aktivitas Ekonomi Nelayan di Desa Sesar

Aktivitas nelayan di Desa Sesar menggambarkan ketergantungan yang kuat terhadap ekosistem laut sebagai sumber utama mata pencaharian. Berdasarkan hasil survei dan observasi lapangan, nelayan umumnya melakukan kegiatan melaut pada pagi hingga siang hari menggunakan perahu kecil dengan peralatan sederhana. Frekuensi melaut dipengaruhi oleh faktor cuaca, musim ikan, dan kondisi ekonomi rumah tangga. Sebagaimana terlihat pada Tabel 1, distribusi tingkat aktivitas nelayan memperlihatkan variasi yang signifikan antarbulan dengan puncak aktivitas pada Maret–Mei, bertepatan dengan musim ikan tongkol dan cakalang.

**Tabel 1.** Frekuensi Aktivitas Melaut Nelayan di Desa Sesar (2024)

| Frekuensi Melaut (per minggu) | Jumlah Nelayan | Persentase (%) |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 1–2 kali                      | 8              | 20.0           |
| 3–4 kali                      | 14             | 35.0           |
| 5–6 kali                      | 13             | 32.5           |
| Setiap hari                   | 5              | 12.5           |
| Total                         | 40             | 100.0          |

Berdasarkan data pada tabel di atas, mayoritas nelayan melaut antara tiga hingga enam kali per minggu. Intensitas ini menunjukkan tingkat ketergantungan tinggi terhadap hasil laut sebagai sumber ekonomi utama, namun juga menggambarkan keterbatasan kapasitas kerja akibat minimnya alat tangkap modern. Nelayan yang melaut setiap hari cenderung adalah mereka yang memiliki perahu bermotor atau akses bahan bakar lebih baik. Fenomena ini menunjukkan bahwa aspek infrastruktur dan kepemilikan aset mempengaruhi produktivitas nelayan secara langsung. Sebagaimana terlihat pada Tabel 2, variasi hasil tangkapan nelayan memperlihatkan fluktuasi berdasarkan musim dan jenis alat tangkap yang digunakan. Data ini menggambarkan tingkat produktivitas nelayan serta potensi risiko ketidakstabilan ekonomi rumah tangga akibat perubahan kondisi lingkungan laut.

**Tabel 2.** Rata-rata Hasil Tangkapan Ikan per Hari (Kg) Berdasarkan Jenis Alat Tangkap

| Jenis Alat Tangkap    | Rata-rata Hasil (Kg) | Persentase (%) |
|-----------------------|----------------------|----------------|
| Pancing Tangan        | 25                   | 30.0           |
| Jaring Insang         | 35                   | 40.0           |
| Bubu / Perangkap      | 15                   | 17.5           |
| Pukat Tarik Sederhana | 12                   | 12.5           |
| Total                 | —                    | 100.0          |

Dari tabel tersebut terlihat bahwa penggunaan jaring insang memberikan hasil tangkapan paling tinggi. Namun, metode ini juga berpotensi merusak ekosistem laut bila dilakukan tanpa pengaturan zona tangkap. Hal ini memperlihatkan dilema antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan alat tangkap ramah lingkungan menjadi kebutuhan mendesak bagi keberlanjutan ekonomi pesisir di Desa Sesar.

## 2. Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Nelayan

Analisis ekonomi rumah tangga nelayan memperlihatkan adanya ketimpangan signifikan antara pendapatan dan pengeluaran bulanan. Sebagaimana terlihat pada Tabel 3, pendapatan nelayan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga ikan dan hasil tangkapan musiman.

**Tabel 3.** Distribusi Pendapatan Bulanan Rumah Tangga Nelayan (Rp)

| Kisaran Pendapatan (Rp) | Jumlah KK | Persentase (%) |
|-------------------------|-----------|----------------|
| < 1.500.000             | 6         | 15.0           |
| 1.500.000–2.499.999     | 14        | 35.0           |
| 2.500.000–3.499.999     | 13        | 32.5           |
| ≥ 3.500.000             | 7         | 17.5           |
| Total                   | 40        | 100.0          |

Dari data tersebut, 50% nelayan memiliki pendapatan di bawah Rp2.500.000 per bulan, menunjukkan tingkat kesejahteraan yang relatif rendah dibandingkan standar kebutuhan hidup layak di Provinsi Maluku (Rp3.200.000/bulan, BPS 2024). Kondisi ini diperparah oleh pola pengeluaran yang tinggi, terutama untuk kebutuhan pangan dan biaya pendidikan anak.

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4, pengeluaran terbesar berasal dari kebutuhan dasar rumah tangga seperti makanan, transportasi, dan biaya pendidikan.

**Tabel 4.** Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Nelayan per Bulan (Rp)

| Komponen Pengeluaran | Rata-rata (Rp) | Persentase (%) |
|----------------------|----------------|----------------|
| Pangan               | 1.400.000      | 44.0           |
| Transportasi         | 600.000        | 19.0           |
| Pendidikan           | 500.000        | 16.0           |
| Kesehatan            | 300.000        | 9.0            |
| Lain-lain            | 400.000        | 12.0           |
| Total                | 3.200.000      | 100.0          |

Dari tabel tersebut tampak bahwa sebagian besar penghasilan nelayan terserap untuk kebutuhan konsumtif. Kondisi ini membatasi kemampuan mereka dalam melakukan investasi produktif seperti pembelian alat tangkap baru atau perbaikan kapal. Pola konsumsi yang tinggi tanpa disertai manajemen keuangan menyebabkan ketahanan ekonomi keluarga nelayan rentan terhadap fluktuasi pasar.

### 3. Aset Produktif dan Kepemilikan Sarana Melaut

Sebagaimana terlihat pada Tabel 5, tingkat kepemilikan aset produktif menjadi indikator penting dalam menentukan kesejahteraan ekonomi nelayan.

**Tabel 5.** Distribusi Kepemilikan Aset Produktif oleh Nelayan

| Jenis Aset          | Jumlah Pemilik | Persentase (%) |
|---------------------|----------------|----------------|
| Perahu Bermotor     | 18             | 45.0           |
| Perahu Tanpa Motor  | 12             | 30.0           |
| Mesin Cadangan      | 6              | 15.0           |
| Alat Tangkap Modern | 4              | 10.0           |
| Total               | 40             | 100.0          |

Dari tabel di atas, terlihat bahwa hanya 45% nelayan yang memiliki perahu bermotor. Sisanya masih menggunakan perahu tanpa mesin yang membatasi jangkauan tangkap. Akses terhadap modal menjadi hambatan utama dalam meningkatkan produktivitas. Selain itu, ketergantungan terhadap lembaga informal seperti tengkulak memperparah kondisi ekonomi karena sistem bagi hasil yang tidak adil. Sebagaimana ditampilkan pada Tabel 6, sumber permodalan nelayan sebagian besar berasal dari pinjaman nonformal yang berbunga tinggi.

**Tabel 6.** Sumber Modal Usaha Nelayan

| Sumber Modal       | Jumlah Nelayan | Persentase (%) |
|--------------------|----------------|----------------|
| Tabungan Pribadi   | 10             | 25.0           |
| Pinjaman Tengkulak | 18             | 45.0           |
| Koperasi Nelayan   | 8              | 20.0           |
| Lain-lain          | 4              | 10.0           |
| Total              | 40             | 100.0          |

Kondisi tersebut menunjukkan urgensi program pemberdayaan finansial berbasis koperasi dan lembaga keuangan mikro agar nelayan tidak terjebak dalam jeratan utang. Akses terhadap kredit lunak dan pelatihan manajemen keuangan menjadi solusi penting untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di masa depan.

### 4. Peran Sosial dan Kelembagaan dalam Kegiatan Nelayan

Kelembagaan lokal memiliki peran penting dalam memperkuat solidaritas dan keberlanjutan aktivitas ekonomi nelayan. Dari hasil wawancara, lembaga seperti kelompok nelayan, koperasi, dan organisasi adat memiliki kontribusi berbeda dalam mengatur distribusi hasil tangkapan, bantuan alat, dan pelatihan. Sebagaimana terlihat pada Tabel 7, tingkat partisipasi nelayan dalam lembaga ekonomi lokal relatif bervariasi.

**Tabel 7.** Partisipasi Nelayan dalam Lembaga Ekonomi Lokal

| Jenis Kelembagaan | Jumlah Anggota | Persentase (%) |
|-------------------|----------------|----------------|
| Kelompok Nelayan  | 20             | 50.0           |
| Koperasi Maritim  | 10             | 25.0           |
| Organisasi Adat   | 6              | 15.0           |
| Non-Aktif         | 4              | 10.0           |
| Total             | 40             | 100.0          |

Berdasarkan data tersebut, 50% nelayan aktif dalam kelompok nelayan formal. Partisipasi ini memperkuat jaringan sosial sekaligus memperluas akses terhadap bantuan pemerintah. Namun, efektivitas lembaga masih terkendala keterbatasan kapasitas manajerial. Sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 8, frekuensi pelatihan dan pendampingan yang diterima nelayan masih tergolong rendah.

**Tabel 8.** Keterlibatan Nelayan dalam Program Pelatihan (2023–2024)

| Jenis Pelatihan                 | Jumlah Peserta | Persentase (%) |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Pelatihan Pengolahan Hasil Laut | 12             | 30.0           |
| Pelatihan Keuangan Mikro        | 8              | 20.0           |
| Pelatihan Konservasi Laut       | 5              | 12.5           |
| Tidak Pernah Mengikuti          | 15             | 37.5           |
| Total                           | 40             | 100.0          |

Minimnya pelatihan memperlihatkan kurangnya integrasi kebijakan lintas sektor antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan tinggi yang seharusnya berperan dalam penguatan kapasitas masyarakat pesisir.

## 5. Kesejahteraan Sosial dan Ketahanan Keluarga Nelayan

Aspek kesejahteraan sosial nelayan meliputi tingkat pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar. Sebagaimana tampak pada Tabel 9, sebagian besar kepala keluarga nelayan memiliki tingkat pendidikan dasar yang membatasi kemampuan adaptasi terhadap inovasi teknologi.

**Tabel 9.** Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga Nelayan

| Tingkat Pendidikan | Jumlah KK | Persentase (%) |
|--------------------|-----------|----------------|
| SD/Sederajat       | 24        | 60.0           |
| SMP/Sederajat      | 10        | 25.0           |
| SMA/Sederajat      | 6         | 15.0           |
| Perguruan Tinggi   | 0         | 0.0            |
| Total              | 40        | 100.0          |

Data tersebut menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan formal nelayan, yang berimplikasi pada rendahnya literasi ekonomi dan teknologi. Selain itu, dari Tabel 10 dapat dilihat bahwa sebagian besar keluarga nelayan belum memiliki jaminan kesehatan formal seperti BPJS, yang menandakan lemahnya perlindungan sosial.

**Tabel 10.** Kepemilikan Jaminan Sosial dan Akses Kesehatan

| Jenis Jaminan Sosial | Jumlah KK | Persentase (%) |
|----------------------|-----------|----------------|
| BPJS Kesehatan       | 14        | 35.0           |
| Asuransi Swasta      | 2         | 5.0            |
| Tidak Memiliki       | 24        | 60.0           |
| Total                | 40        | 100.0          |

Kondisi ini menegaskan bahwa dimensi kesejahteraan nelayan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan kesehatan. Upaya pembangunan pesisir ke depan perlu berfokus pada penguatan ketahanan keluarga melalui pendidikan, kesehatan, dan akses ekonomi yang setara.

## B. Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa aktivitas nelayan di Desa Sesar masih didominasi oleh sistem kerja tradisional dengan ketergantungan tinggi terhadap faktor cuaca dan peralatan konvensional. Pendapatan nelayan cenderung fluktuatif dan bergantung pada musim tangkap, sedangkan pengeluaran rumah tangga tetap tinggi untuk kebutuhan dasar seperti pangan dan pendidikan anak. Pola ini menggambarkan adanya ketimpangan struktural antara potensi sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kondisi tersebut sejalan dengan kajian Yuliriane (2022) yang menegaskan bahwa nelayan tradisional di kawasan timur Indonesia masih menghadapi keterbatasan modal, rendahnya literasi finansial, dan minimnya dukungan kelembagaan lokal. Dengan demikian, aktivitas ekonomi nelayan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekologis, tetapi juga oleh struktur sosial dan kebijakan pembangunan daerah.

Dalam konteks global, hasil ini selaras dengan pandangan Sterling (2020) yang menekankan pentingnya *ecopedagogy* dan keberlanjutan ekonomi laut berbasis komunitas sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Secara konseptual, model pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir perlu menekankan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi agar tidak terjebak pada eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Hal ini juga sejalan dengan laporan UNESCO (2023) tentang *Education for Sustainable Development*, yang menyoroti pentingnya peran pendidikan dan kesadaran lingkungan dalam mengubah perilaku sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Dengan demikian, pendekatan transformatif dalam pengelolaan sumber daya laut menjadi kebutuhan mendesak di wilayah kepulauan seperti Maluku.

Temuan penelitian ini juga memperluas pemahaman tentang teori *community-based livelihood development*, di mana faktor sosial, budaya, dan ekonomi saling berinteraksi membentuk daya tahan (*resilience*) komunitas. Di Desa Sesar, sistem kerja kolektif yang berbasis pada nilai *pela gandong* dan gotong royong memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kekuatan sosial ekonomi lokal. Perspektif ini sejalan dengan kajian Leatemia dan Pattiasina (2023) yang menekankan bahwa modal sosial merupakan elemen kunci dalam penguatan ketahanan komunitas pulau. Dalam kerangka ini, nilai-nilai budaya lokal tidak hanya menjadi warisan sosial, tetapi juga fondasi bagi pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat relevansi *Transformational Eco-Leadership Theory* yang dikembangkan Bass dan Riggio (2019), di mana kepemimpinan yang berorientasi pada transformasi nilai dan kesadaran ekologis menjadi motor perubahan sosial. Dalam konteks masyarakat pesisir, kepemimpinan ekologis dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi sumber daya laut. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kepala desa dan tokoh adat berperan penting dalam membentuk perilaku adaptif nelayan terhadap perubahan lingkungan dan pasar. Hal ini memperluas konsep kepemimpinan transformasional ke dalam konteks lokal yang lebih kultural dan ekosentris.

Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki implikasi signifikan bagi kebijakan daerah dan nasional. Penguatan kapasitas nelayan melalui program pemberdayaan berbasis literasi keuangan, pelatihan teknologi penangkapan ramah lingkungan, dan pembentukan koperasi maritim menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi pesisir. Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan hasil penelitian ini ke dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir yang selaras dengan *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2025–2045)* dan *SDGs Agenda 2030*. Kebijakan yang partisipatif dan berbasis data lokal diyakini dapat mempercepat terwujudnya *blue economy* yang inklusif dan berkeadilan (World Bank, 2022).

Selain kontribusi praktis, penelitian ini memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan teori dan metodologi dalam studi ekonomi pesisir. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa kesejahteraan nelayan bukan semata persoalan ekonomi, melainkan hasil interaksi kompleks antara faktor ekologis, sosial, dan kebijakan. Secara konseptual, penelitian ini memperluas model *socio-ecological resilience* dalam konteks masyarakat pulau-pulau kecil, sebagaimana ditegaskan oleh Hair et al. (2022) yang menyebutkan bahwa model berbasis ketahanan sosial-ekologis lebih efektif dalam mengkaji keberlanjutan ekonomi maritim. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan model konseptual baru dalam studi pembangunan pesisir berkelanjutan di Indonesia.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Keterbatasan utama terletak pada cakupan lokasi yang hanya berfokus pada satu desa pesisir di Kabupaten Seram Bagian Timur. Kondisi geografis dan sosial yang berbeda di wilayah lain kemungkinan menghasilkan pola kesejahteraan dan aktivitas ekonomi yang tidak seragam. Selain itu, faktor kebijakan daerah dan infrastruktur pelabuhan juga dapat mempengaruhi hasil penelitian. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan komparatif lintas wilayah dan metode *mixed-methods* guna memperdalam pemahaman tentang dinamika ekonomi maritim di kawasan timur Indonesia.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan nelayan memerlukan pendekatan integratif antara ekonomi, pendidikan, dan budaya lokal. Dengan mengadopsi prinsip *eco-leadership* dan penguatan modal sosial, masyarakat pesisir dapat mengembangkan model pembangunan mandiri yang berkelanjutan. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur ilmiah tentang kepemimpinan ekologis dan ekonomi maritim, sekaligus memberikan dasar empiris bagi kebijakan pembangunan daerah berbasis kearifan lokal di wilayah kepulauan Indonesia.

## KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kesejahteraan nelayan di Desa Sesar merupakan hasil interaksi dinamis antara faktor ekonomi, sosial, dan ekologis yang saling mempengaruhi dalam sistem kehidupan masyarakat pesisir. Aktivitas nelayan tradisional yang masih bergantung pada kondisi alam menuntut adanya strategi adaptif berbasis nilai lokal dan dukungan kebijakan yang berpihak pada masyarakat maritim. Temuan penelitian memperluas pemahaman teoritis tentang hubungan antara kepemimpinan ekologis, modal sosial, dan ketahanan komunitas pesisir, sekaligus memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan model pembangunan ekonomi berkelanjutan di wilayah kepulauan. Secara praktis, hasil ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pemberdayaan ekonomi biru yang inklusif, partisipatif, dan berbasis budaya lokal. Meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan lokasi dan cakupan, arah penelitian selanjutnya perlu memperluas analisis lintas wilayah guna memperkaya perspektif tentang pembangunan maritim berkelanjutan di Indonesia timur.

## DAFTAR PUSTAKA

Arifandi, M. (2020). Kondisi sosial ekonomi nelayan di kawasan timur Indonesia. *Jurnal Ekonomi Maritim*, 8(2), 145–160. <https://doi.org/10.31002/jem.v8i2.1234>

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik kesejahteraan nelayan Indonesia 2024*. Jakarta: BPS.
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2019). *Transformational leadership*. New York: Psychology Press.
- BPS Provinsi Maluku. (2024). *Statistik daerah Provinsi Maluku 2024*. Ambon: BPS Maluku.
- BRIN. (2024). *Laporan riset nasional kemaritiman dan perikanan*. Jakarta: BRIN Press.
- FAO. (2023). *The state of world fisheries and aquaculture 2023: Sustainability in action*. Rome: FAO. <https://doi.org/10.4060/cc0461en>
- Gunawan, I. (2021). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. Bandung: Alfabeta.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-15822-3>
- Harris, A., & Spillane, J. (2021). Distributed leadership through the looking glass. *Educational Management Administration & Leadership*, 49(3), 321–340. <https://doi.org/10.1177/1741143220985115>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (2023). *Peta potensi perikanan nasional 2023*. Jakarta: KKP.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (2024). *Laporan statistik produksi perikanan tangkap nasional 2024*. Jakarta: KKP.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2024). *Laporan statistik perikanan tangkap nasional 2024*. Jakarta: KKP.
- Kurniasari, D. (2021). Strategi adaptasi nelayan terhadap perubahan iklim di pesisir timur Indonesia. *Jurnal Sosiohumaniora*, 23(3), 201–216. <https://doi.org/10.24198/sosio.v23i3.35621>
- Leatemia, S., & Pattiasina, J. (2023). Eco-leadership dan ketahanan sosial masyarakat pulau. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan*, 11(2), 55–71.
- Leiwakabessy, F. (2021). Kearifan lokal dan ketahanan ekonomi pesisir Maluku. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, 9(2), 112–130.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2023). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Munandar, R. (2021). Struktur sosial ekonomi nelayan tradisional di Indonesia timur. *Jurnal Pembangunan Maritim*, 9(1), 11–27.
- Nazir, M. (2020). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Paul Samuelson. (2019). *Economics*. New York: McGraw-Hill.
- RPJPN. (2025). *Rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025–2045*. Jakarta: Bappenas.
- Sataloff, R., Wenno, I., & Leiwakabessy, F. (2020). Kebijakan maritim dan kedaulatan laut nasional. *Jurnal Administrasi Negara*, 12(1), 45–60.
- Sterling, S. (2020). *Sustainable education: Revisioning learning and change*. London: Routledge.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, L., & Arifin, Z. (2023). Ketimpangan kesejahteraan nelayan di Indonesia timur. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(2), 88–102.
- Tetelepta, G. (2022). Kearifan lokal dan ketahanan sosial komunitas pesisir Maluku. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 43(1), 74–90.
- UNESCO. (2023). *Education for sustainable development progress report 2023*. Paris: UNESCO.
- World Bank. (2022). *Blue economy development framework*. Washington, DC: World Bank.
- Yuliriane, A. (2022). Pemberdayaan ekonomi nelayan melalui literasi keuangan dan koperasi maritim. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(4), 333–348.